



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZKI ANGGORO ADI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 231813

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.600.000

1. MOTOR, HONDA GL SEPEDA MOTOR Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
2. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
3. MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.504.461

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 383.904.461

III. HUTANG Rp. 336.234.869

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 47.669.592

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YATNI PRASETYOWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 496845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 218.150.000

1. Tanah Seluas 1.330 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 128.250.000
2. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 89.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO MIO AT/AL115S 28 D Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.355.975

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.311.625

F. HARTA LAINNYA Rp. 4.000.000

Sub Total Rp. 572.817.600

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 572.817.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RABIATUL ADAWIYAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 1000199

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 698.645.350

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 698.645.350

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.501.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.632.806

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 729.779.156

III. HUTANG Rp. 687.155.234

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 42.623.922

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.